



**KAMIS, 14 FEBRUARI 2019**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF    NETRAL    BAHAN PEMERIKSAAN    PERHATIAN KHUSUS

**Genjot Penyelesaian Temuan BPK**

**BENGKULU**

- Pemerintah Provinsi Bengkulu menggenjot penyelesaian temuan audit BPK atas LKPD KDH sejak tahun anggaran 2015 sampai 2018. Asisten III Pemprov Bengkulu, Gotri Suyanto mengatakan ini merupakan



**GOTRI SUYANTO**

pekerjaan rutin Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil audit tersebut. Sejauh ini dari 1.315 rekomendasi BPK itu, 60,61 persen sudah ditindaklanjuti. Dalam artian 39,39 persen lagi masih dalam proses penyelesaian. "Kita targetkan paling tidak angka penyelesaiannya sampai di 70 persen minimal dalam waktu dekat ini," terang Gotri.

Sehingga temuan yang sifatnya administratif seperti teguran, harus segera diselesaikan oleh setiap OPD yang mendapatkan rekomendasi dari BPK. Sejauh ini mereka terus melakukan evaluasi baik itu temuan sifat administratif ataupun temuan yang sifatnya kerugian keuangan daerah.

► Baca **GENJOT...Hal 7**



**SUMBER BERITA**

**KAMIS, 14 FEBRUARI 2019**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Genjot Penyelesaian Temuan BPK**

Sambungan dari halaman 1

Sehingga saat ini Pemprov menggerakkan seluruh OPD temuan administratif harus diselesaikan lebih dahulu. "Kita evaluasi sejak tahun 2015 sampai tahun anggaran 2018 kemarin," terangnya.

Dia menjelaskan laporan audit keuangan negara ini harus ditindak lanjuti. Sejauh ini upaya yang dilakukan sudah sangat baik. Dengan banyaknya rekomendasi yang sudah diselesaikan tersebut. "Kita terus melakukan upaya supaya ini bisa diselesaikan," terangnya.

Dari data temuan tersebut, yang terbanyak belum diselesaikan ada di Sekretariat DPRD, dimana temuan kerugian negara 12,85 persen. Kemudian temuan administratifnya 31 temuan. Kedua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) temuan kerugian keuangan daerah mencapai 4,34

persen sedangkan temuan administratif mencapai 133 temuan. Urutan ketiga RSUD M. Yunus temuan kerugian keuangan daerah sebesar 3,98 persen dan temuan administratif sebanyak 89 temuan (*lengkapnya lihat grafis*).

Gotri mengatakan kalau temuan-temuan tersebut akan diupayakan dilakukan penyelesaian secara bertahap. Dengan menetapkan target minimal yang akan diselesaikan sebanyak 70 persen da-

**TINDAK LANJUT AUDIT BPK ATAS LKPD KDH  
TAHUN 2015 SAMPAI 2018 PERSENTASE**

Sudah ditindaklanjuti **60,61 persen**  
Belum ditindaklanjuti **39,39 persen**

Rincian Temuan		
OPD	Temuan Kerugian Negara	Temuan Bersifat Admnsitratif
1. Biro Pemerintahan dan Kesra	0,78 persen	0
2. Biro Umum Humas dan Protokol	3,04 persen	15
3. Biro Administrasi Pembangunan	0,01 persen	1
4. Biro Adm. Perekonomian dan SDA	0,002 persen	20
5. Biro Hukum	0,00 persen	3
6. Biro Organisasi	0,00 persen	2
7. Sekretariat DPRD	12,85 persen	31
8. RSUD M. Yunus	3,98 persen	89
9. RSJKO Soeprpto	0,00 persen	9
10. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,17 persen	11
11. BPBD	0,37 persen	12
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00 persen	3
13. Bappeda	0,01 persen	50
14. Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00 persen	6
15. Dinas Tanaman pangan Hortikultura	0,26 persen	13
16. BPKD	4,34 persen	133
17. DPMPSTP	0,00 persen	4
18. Diskominfo dan Statistik	0,12 persen	1
19. Dinas Perhubungan	0,59 persen	16
20. Dinas Ketahanan Pangan	0,00 persen	13

lam waktu dekat ini. "Kita akan upayakan untuk penyelesaiannya," tutupnya. (del)